

KONFLIK KEPENTINGAN PEREBUTAN PESISIR KOTA MAKASSAR DALAM PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA

*Conflicts of Interest of Seizing the Coastal City of Makassar City in the Development of
Center Point of Indonesia*

Babra Kamal

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Email: babrakamal@gmail.com

Abstrak

Penolakan terhadap reklamasi di pesisir Kota Makassar karena pembangunan Center Point Of Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar dan dinamika konflik perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di pesisir Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu klasifikasi data, agregasi data dan menyusun pernyataan pokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar ada dua faktor yakni, keuntungan lokasi dan kemudahan regulasi. Konflik yang terjadi dalam pembangunan ini yakni (1) antara Pengusaha; (2) antara Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan LSM; dan (3) antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan tiga Fraksi Di DPRD Provinsi Sulsel.

Kata Kunci : Reklamasi, Center Point Of Indonesia, Kota Makassar

Abstract

The rejection of reclamation on the coast because of the construction of the Center Point of Indonesia city of Makassar. This research aims to investigate and identify the factors that causing the entrepreneurs to seizure the coastal areas in the construction of the Center Points Of Indonesia in Makassar City, and the conflict dynamics of the seizure of coastal areas in the construction of the Center Points Of Indonesia in Makassar City. This research used the qualitative method in order to illustrate the interest conflict occurring in the construction of the Center Point of Indonesia in Makassar City. This research was conducted along the coastal areas of Makassar City. The data were collected using the interviews, observations and Library studies. The data were then analyzed using descriptive analysis, namely the data classification, data aggregation, and The drawing of principal statements. The research results indicated that the factors that led the capture of the coastal areas by the entrepreneurs in the construction of the Center Points Of Indonesia in Makassar City comprised two factors namely the advantages and the ease of regulation. The conflict that occurred in the development were first, among the entrepreneurs; second the conflict between the provincial Government of South Sulawesi and the NGOs and the third, conflict between the provincial Government of South Sulawesi and the three Factions in the DPRD of South Sulawesi Provincial.

Key Words: Reclaimed, The Center Point Of Indonesia, The City Of Makassar

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang dikategorikan negara dunia ketiga atau negara berkembang tak lepas dari dampak pembangunan global, pasca lepas dari belenggu kolonialisme terutama sejak era orde baru kata pembangunan sering digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pada masa orde baru kita mengenal istilah triologi pembangunan yang terdiri atas stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan pembangunan. Pembangunan menjadi ideologi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan yang terjadi hanya nampak di kawasan tertentu saja di Indonesia yang berarti bahwa ada ketimpangan yang cukup besar antara misalnya kawasan Indonesia barat dengan kawasan Indonesia timur, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa. Ketimpangan ini jelas terlihat dari pembangunan fisik misalnya gedung-gedung tinggi, jalan raya, industri dan lain lain, yang hanya berada dan berpusat di suatu kawasan saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Cong bahwa semua ibukota di Asia Tenggara pastilah kota terbesar dinegaranya. Proses urbanisasi terkonsentrasi di kota-kota utama, tempat bermukim bagi setengah dari semua penduduk perkotaan dan tingkat pertumbuhannya penduduk kota secara keseluruhan (Hans & Rudiger, 2002).

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah yang berada di tepian pantai (*waterfront city*) karena dahulu merupakan kota pelabuhan kolonial, menjadikan kawasan ini sangat vital bagi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi dan politik, sehingga tidak mengherankan jika terjadi proses urbanisasi dari desa ke kota, data kompas menyebutkan hampir 54% penduduk Indonesia tinggal dikota. Konsekuensi yang muncul adalah timbulnya masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar mulai melirik daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pesisir (*Coastal Zone*) (Rahmat, 2014).

Reklamasi akhirnya menjadi pilihan pemerintah daerah dalam memperluas ruang, fenomena ini merebak di berbagai kota besar di Indonesia, seperti reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Teluk Palu, reklamasi Pantai Marina Semarang, reklamasi Teluk Balikpapan, reklamasi Pantai Kenjer Surabaya, reklamasi Teluk Benoa Bali, reklamasi Pantai Serio Manado dan reklamasi Pantai Losari Makassar. Dalam perkembangannya, reklamasi ternyata banyak yang bermasalah hingga mendapat perlawanan di berbagai kota, sebut saja misalnya reklamasi yang terjadi di ibukota Jakarta yang telah menjerat salah satu anggota DPRD DKI Jakarta seperti laporan Liputan6.com.

Reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar juga mendapat perlawanan dari masyarakat, setidaknya ada dua kelompok masyarakat (*civil society*) yang menolak reklamasi pesisir Kota Makassar yakni Koalisi masyarakat Anti Korupsi (KMAK) dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), keduanya menolak rencana reklamasi pantai Losari yang secara khusus menyoroti pembangunan kawasan Center Poin Of Indonesia (CPI). Kedua kelompok ini menilai kegiatan reklamasi tidak mendapat izin dari pemerintah pusat sebagai mana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang pedoman perencanaan Reklamasi Pantai.

Dua persoalan yang mengemuka menurut penulis dalam berbagai kasus reklamasi yakni persoalan regulasi dan yang kedua adalah persoalan tujuan dan konsep dari reklamasi itu sendiri. Masalah yang pertama cukup rumit karena terkait hirarki perundang-undangan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik tingkat pusat, propinsi, maupun kota/kabupaten yang kadang tumpang tindih.

Kedua, mengenai tujuan dan konsep dari reklamasi itu sendiri yang kadang menyimpang dari tujuan awalnya, misalnya jika melihat kasus reklamasi DKI Jakarta yang pada awalnya tujuannya membangun semacam tembok raksasa (Giant Seewall) untuk ketinggian melindungi Jakarta dari banjir rob, kemudian berubah menjadi semacam pembangunan pulau-pulau buatan yang di dalamnya terdapat kompleks perumahan mewah, begitu pula misalnya yang terjadi dengan pembangunan Center Poin Of Indonesia yang pada awalnya membuat semacam *space public* dalam hal ini *Equilibrium Center Park* (taman) dalam perjalanannya berubah menjadi sebuah kota baru. Reklamasi seakan berada dipersimpangan jalan, apakah untuk kepentingan bisnis atau untuk kepentingan umum.

Beberapa Penelitian mengenai reklamasi pesisir Makassar salah satunya yang dilakukan oleh Akbar (2015), dengan tema *Dinamika Politik Antar Aktor Dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai sesuai dengan perintah Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung di kawasan pesisir Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Makassar ini karena melihat proses reklamasi pesisir Kota Makassar yang menimbulkan banyak masalah.

Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Adapun tipe penelitian menggunakan *deskripsi kualitatif* adalah peneliti berusaha mendeskripsikan atau mengkonstruksi hasil wawancara terhadap objek penelitian. Data dan informasi yang

dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui analisis data kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan- pertanyaan peneliti

Teknik pengumpulan data yakni peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dengan informan, dimana hasil dari wawancara akan menjadi data mentah. Steward, G. mengatakan bahwa secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset (Harrison, 2007). Penulis selain turun ke lapangan, juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran, dan sumber informasi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut : reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Menurut Huberman dan Miles, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (Denzin *et al.*, 2009). Proses ini berlangsung sejak sebelum tahap pengumpulan data, sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, dan setelah tahap pengumpulan data akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 52,8 KM yang terdiri garis pantai daerah pesisir sepanjang 36,1 Km serta garis pantai pulau-pulau gusung sepanjang 16,7 Km. Topografi relatif datar dengan kemiringan lahan 0-15% dan ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut. Kondisi yang relative datar tersebut sesuai untuk berbagai jenis penggunaan lahan seperti pelabuhan, pertanian/tambak, rekreasi dan konservasi. Reklamasi atau penimbunan laut terjadi dipesisir Kota Makassar mulai gencar dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2015. Kasus penimbunan pesisir Mariso, Pembangunan hotel Swiss Bell, penimbunan pesisir Buloa, reklamasi pantai oleh pihak GMTDC serta reklamasi proyek CPI merupakan serangkaian kegiatan reklamasi di pesisir kota Makassar (Walhi, 2016).

Beberapa perusahaan yang telah melakukan reklamasi pantai, diantaranya PT Asindo, PT Mariso Indoland, PT. GMTDC, Hotel Swiss Bell, PT. Yasmin Bumi Asri (CPI) bahwa kegiatan reklamasi yang selama ini terjadi di kawasan pesisir Makassar telah berdampak serius terhadap ekosistem wilayah reklamasi dan wilayah perairan sekitarnya. Di awal tahun 2015, atas desakan masyarakat sipil kegiatan illegal reklamasi atau penimbunan laut yang

dilakukan pengembang di hentikan oleh pansus RTRW dan Pemkot Makassar. Penghentian ini sifatnya hanya sementara, menunggu kepastian alokasi ruang reklamasi yang akan dibahas oleh pansus Ranperda RTRW Makassar 2015-2030. Masyarakat dan akademisi telah memberikan pandangan terkait reklamasi pesisir Makassar dalam rapat dengar pendapat dengan pansus DPRD Kota Makassar.

Center Point of Indonesia (CPI) adalah sebuah mega proyek yang awalnya pada tahun 2009 bernama *Equalibrium Centre Park* (ECP). Sebuah kawasan super megah di Sulawesi Selatan yang di dalamnya akan dibangun pusat bisnis, wisata dan pendidikan yang berpusat di Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (lihat Gambar 1 Site Plan Center Poin Of Indonesia). Proyek tersebut merupakan proyek mercusuar Pemerintahan Syahrul Yasin Limpo–Agus Arifin Nu'man setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada Periode 2008-2013 (Kopel, 2015).

Memasuki tahun 2009 Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2009 berjanji di depan anggota DPRD Sulawesi Selatan bahwa Proyek CPI itu akan dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui APBN, sehingga tidak akan menguras anggaran daerah. Untuk pembangunan kawasan CPI, Pemerintah Provinsi menunjuk 3 (tiga) SKPD terkait masing-masing Dinas Tarkim, Dinas PSDA, dan Dinas Bina Marga. Alokasi anggaran untuk pembangunan proyek CPI dengan menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan serta kegiatan proyek di lapangan yang dikerjakan oleh rekanan masing-masing SKPD terkait.

Sejak dibangun tahun 2009 hingga sekarang, kondisi fisik di lapangan baru sementara proses penimbunan, penyelesaian pengerjaan jembatan dan pengerjaan jalan. Sumber pendanaan CPI selama ini bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan TA 2009–2014. Awalnya tahun 2009 menurut Gubernur hanyalah anggaran “pancingan” untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada satu rupiah pun bantuan dari pemerintah pusat yang masuk ke proyek ini.

Imran Tenri Tatta Amin Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa keyakinan Gubernur Sulsel bahwa dana APBN Akan membiayai pembangunan CPI salah kaprah, menurutnya itu hanya semacam “*Gentlemen Speak*” dari Presiden SBY, kenyataannya memang sampai habis Periode SBY, APBN tak kunjung kecur ke Proyek tersebut. Karena tidak mendapat Anggaran APBN “terpaksa” proyek ini menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Total anggaran yang digunakan dalam pembangunan proyek ini sejak tahun 2009-2013 sebesar Rp.141.148.560.000,00 dan

dikerjakan oleh rekanan masing-masing SKPD hingga tahun 2013 oleh sedikitnya 12 rekanan dengan jumlah paket pekerjaan sedikitnya 15 paket.

Jika reklamasi pada periode 2009 - 2013 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui 3 SKPD terkait, yakni Dinas Tarkim, Dinas PSDA, dan Dinas Bina Marga dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh sedikitnya 12 rekanan perusahaan, maka aktifitas reklamasi pada tahun 2013 hingga saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui perjanjian kerja sama dengan PT. Yasmin Bumi Asri. (lihat Gambar 2 MOU Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Yasmin Bumi Asri Tahun 2013)

Pada tahun 2013 PT. Yasmin Bumi Asri melakukan join operation dengan PT. Ciputra dalam melakukan reklamasi, Dalam bisnis Properti di Indonesia PT.Ciputra Development Tbk bukanlah nama yang asing, perusahaan yang didirikan 22 Oktober 1981 dengan nama PT. Citra Habitat Indonesia dan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1984. Perusahaan yang di miliki Ciputra ini telah memperluas operasinya dan sudah mengembangkan 33 properti perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, apartement, kompleks pergudangan dan Lapangan Golf di 20 kota besar di seluruh Indonesia, namun saat ini mayoritas kepemilikan saham PT. Ciputra Development sudah dikuasai oleh asing sesuai pernyataan Direktur Utamanya Candra Ciputra.

Sepak terjang perusahaan ini sudah tak diragukan lagi, Ciputra lewat PT.Pembangunan Jaya yang pertama kali mereklamasi kawasan Ancol Jakarta utara, rawa Ancol seluas 552 hektar kemudian disulap menjadi sebuah kawasan wisata yang kemudian dikenal dengan Taman Impian Jaya Ancol dan juga kawasan Rela Estate, Ciputra dari awal optimis dengan Ancol, "Jakarta ini adalah kota pantai, satu-satunya pantai yang dekat dengan permukiman adalah Ancol, kita dapat mengembangkan Ancol menjadi pantai nomor satu. Itu akan menjadi pantai emas" ujarnya.

Di Kota Makassar dengan adanya Kepres tentang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata membuka ruang bagi Ciputra untuk meluaskan usahanya ke kawasan timur Indonesia, Ciputra dan beberapa pemilik modal lainnya mendapat konsesi yang berada tepat diperbatasan Kota Makassar-Kabupaten Gowa.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan Lokasi sangat penting bagi perusahaan properti karena dalam struktur biaya produksi rumah, porsi harga tanah mencapai 25 persen dari total ongkos

produksi. Secara keseluruhan biaya produksi mencapai sekitar 70-80 persen dari harga jual. Sehingga ketika harga tanah bisa ditekan maka tingkat keuntungan yang didapat pengusaha tentu sangat besar.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Harvey (2010), bahwa para kapitalis (pemodal) individual mengejar kepentingan kompetitif dengan memanfaatkan struktur spasial (ruang) ini dan karena itu cenderung untuk tertarik atau terdorong untuk bergerak kelokasi-lokasi dimana biaya-biayaanya lebih rendah. Keuntungan lokasi memainkan suatu peran yang sama bagi kapitalis-kapitalis individual sebagaimana peran teknologi dan dalam situasi-situasi tertentu keuntungan lokasi bisa mensubstitusi keuntungan teknologi.

Berbanding terbalik dengan biaya produksi yang dikeluarkan para pengusaha properti yang cenderung sangat murah, harga jual perumahan dikawasan tersebut justru sangat tinggi berkisar Rp 13-15 juta per meter. Harga jual yang tinggi inilah menjadi salah satu penyebab kenapa para pengusaha mengincar daerah tersebut.

Beroperasinya pasar oligopoli membenarkan pernyataan kaum neo-klasik seperti yang dikatakan Delianorv (2006), bahwa laba sepenuhnya dihasilkan dalam ranah sirkulasi, dimana komoditi dapat dijual dengan harga sangat tinggi, sehingga hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Ketika rumah dikuasai oleh segelintir orang, maka pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat dilakukan dengan sistem sewa. Harga perumahan yang sangat tinggi diperkotaan membuat PT. Ciputra memaksimalkan keuntungan yang ada.

Kota yang dikembangkan Ciputra ini model kota yang terencana yang menggabungkan permukiman dan sentra bisnis, serta terintegrasi dengan aksesibilitas yang tinggi karena adanya moda transportasi dan akses jalan baik dari dan menuju ke kota. Tidak hanya terhubung dengan pusat kota tetapi juga terintegrasi dengan pusat wisata, hiburan dan pendidikan. RTRW kota Makassar tahun 2010-2035 kawasan CPI ini masuk dalam kawasan bisnis Global sebesar 157,23 Ha, sementara total alokasi ruang reklamasi seluruhnya di Kota Makassar adalah seluas 4500 Ha. Dari sejumlah pengusaha yang mengincar kawasan ini, PT. Ciputra yang berhasil mendapat kesempatan untuk mengelolanya dengan bekerja sama dengan PT. Yasmin Bumi Asri.

Tahun 2009, keluar Penetapan Lokasi Pemprov Sulsel untuk kawasan pembangunan CPI sebelah barat pantai losari, dikecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Penetapan melalui SK Walikota Makassar No. 640/175/Kep/II/09, tanggal 27/02/2009, yang ditandatangani oleh *caretaker* Walikota Makassar HA. Herry Iskandar.

Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644/6273/TARKIM tertanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu

Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategi Provinsi; walaupun dalam aturan yang berlaku bahwa Izin Pelaksanaan reklamasi baru dapat dikeluarkan setelah adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP3K) atau dikeluarkan oleh kementerian jika masuk Kawasan Strategis Nasional.

MOU yang dibangun antara pemerintah Provinsi dengan PT. Yasmin Bumi Asri yang kemudian menggandeng PT.Ciputra dalam klausul perjanjian, terlihat berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah provinsi kepada PT. Yasmin Bumi Asri.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Yasmin Bumi Asri yakni setelah pekerjaan reklamasi selesai ke dua belah pihak berhak memperoleh hasil pekerjaan tersebut dengan pembagian lahan hasil reklamasi seluas 106,76 Ha bagian PT. Yasmin Bumi Asri dan bagian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya seluas 50,47 Ha. Pembagian hasil pekerjaan tersebut telah merugikan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menguntungkan pihak PT. Yasmin Bumi Asri sebagai investor.

Investor properti melihat kawasan Tanjung Bunga Makassar sebagai lahan yang memiliki prospek yang tinggi. Betapa tidak, kecenderungan naiknya harga tanah untuk pengembangan kawasan di daerah ini rata-rata mencapai 25% per tahun. Namun, para investor properti di sini masih terkendala dengan status lahan. Kepastian hukum bagi calon investor yang masuk ke Tanjung Bunga menjadi sangat penting, sebab tidak jarang para pembeli berurusan hingga ke pengadilan.

Konflik lahan yang terjadi di Pesisir Kota Makassar melibatkan investor lama dan investor baru yang masuk di sini juga terjadi. Ini karena status hukum di atas tanah kawasan Tanjung Bunga banyak yang belum pasti. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ketika masih menjabat waktu itu mengakui hal tersebut. Namun, menurutnya, minat investor untuk tetap mengembangkan Tanjung Bunga tidak akan surut. "Ini kawasan yang menjanjikan," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Konflik yang juga mengemuka dalam pembangunan Kawasan CPI yang penulis amati adalah konflik antara kelompok LSM berhadapan dengan pemerintah. Dinamika konflik menurut Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang memunculkan dua kelompok untuk berkonflik. Isu sentral dalam konflik antara kelompok LSM dengan Pemerintah Provinsi Sulsel yakni tentang berbagai pelanggaran yang dilakukan pemprov dalam pelaksanaan reklamasi pembangunan CPI di Kota Makassar, pelanggaran yang disoroti adalah terkait persoalan perizinan dan anggaran yang digunakan pemprov dalam reklamasi CPI.

Sementara itu di Parlemen, Fraksi partai Demokrat, Nasdem dan Fraksi Ummat bersatu yang paling keras menolak Reklamasi CPI, sementara Fraksi yang lain termasuk F.Partai Golkar adalah Fraksi yang mendukung kebijakan tersebut, ini dikarenakan Gubernur pada waktu itu masih menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Jika merujuk kepada Dahrendorf dalam Polma (2000), maka kedua kedua pihak yang berkonflik dalam hal ini baik antara pihak Pemprov (eksekutif) maupun DPRD (legislatif) keduanya mempunyai otoritas, namun otoritas eksekutif berbeda dengan legislatif, kewenangan eksekutif adalah sebagai pelaksana (eksekutor) sedangkan otoritas legislatif yakni pengawasan dan anggaran.

Kedua pihak menggunakan perannya masing-masing dalam kasus pembangunan CPI ini, eksekutif selaku pelaksana kegiatan berharap mendapat dukungan dari legislatif, sementara sebagian kelompok di dalam parlemen tidak menyetujui pembangunan tersebut yang pada akhirnya memunculkan konflik kepentingan dalam pembangunan CPI di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha melakukan perebutan pesisir dalam Pembangunan Center Poin Of Indonesia di Kota Makassar ada dua faktor yakni, Pertama, keuntungan lokasi, di lokasi pembangunan CPI harga tanah yang murah berbanding terbalik dengan harga jual perumahan yang tinggi dan Kawasan CPI ini merupakan Kota yang terencana. Kedua, kemudahan regulasi. yakni Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam hal ini PT.CIPUTRA dalam mereklamasi Kawasan CPI dengan mengeluarkan izin Lokasi, izin reklamasi dan Amdal. Konflik antara pengusaha (investor lama) dengan pengusaha (investor baru) yakni antara PT.GMTD dengan PT.Ciputra, isu yang utama dalam konflik ini adalah persoalan persaingan usaha atau Monopoli dalam penguasaan ruang di kawasan Pesisir Kota Makassar. Konflik antara Pemerintah Provinsi dalam Hal ini Gubernur Sulawesi Selatan dengan Kelompok LSM yang menjadi isu utama dalam konflik ini adalah persoalan Perizinan dan Anggaran dalam Pembangunan CPI. Konflik antara Pemerintah Provinsi dalam Hal ini Gubernur Sulawesi Selatan dengan tiga Fraksi di DPRD Provinsi Sulsel (Fraksi P. Demokrat, Fraksi P.Nasdem dan Fraksi Ummat bersatu). Isu utama dari konflik antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi adalah tentang Anggaran untuk CPI yang selama ini menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Saran penelitian adalah lokasi Pembangunan CPI sangat strategis maka dalam pembangunannya pemerintah perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sebelum melaksanakan proses reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar R.M. (2015). *Dinamika Politik Antar Aktor Dalam Perumusan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*: universitas Hasanuddin
- Denzin *et al.* (2009). *Handbook of Qualitative Research. Terjemahan oleh Dariyanto dkk.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delianorv. (2006) *Ekonomi Politik*. Jakarta : Airlangga.
- Hans & Rudiger. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Harrison. (2007). *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Harvey D. (2010) *Imperialisme baru Genealogi dan logika Kapitalisme Kontemporer*, Jogjakarta: Resist Book.
- Kopel Sulawesi Selatan. (2015). Resume dugaan Penyimpangan/ pelanggaran hukum atas Pelaksanaan Reklamasi Proyek Kawasan CPI.
- Polma M.M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*.
- Rahmat A. (2014). *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar* : universitas Hasanuddin.
- Walhi Sulawesi Selatan. (2016). Laporan Kasus Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) di Pesisir Kota Makassar.